

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- C.F.Strong, *Modern Political Constitution*, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996.
- Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*,. Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006,
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, cet. Ke-1, Jakarta, 1983.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yograkarta, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005.

B. Sumber Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014.

C. Sumber Lainnya

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

<http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html?tmpl=component&print=1&page=>
diakses pada hari Rabu, 29 Juni 2016.